

Kumawula, Vol.7, No.2, Agustus 2024, Hal 421 – 433

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.53429>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DI KAMPUNG MUKIM SINGKIR YAN KEDAH, MALAYSIA

Rahyunir Rauf^{1*}, Zaheruddin Othman², Sri Maulidiah³, Nina Yuslaini⁴, Restu Hayati⁵,
Muhammad Hafizh Rahyunir⁶

^{1,3,4,5,6,7,8}Universitas Islam Riau, Indonesia

²Universiti Utara Malaysia, Malaysia

*Korespondensi: rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

The needs and dynamics of a complex society are certainly quite a heavy job for the government so that the government needs partners in assisting government tasks as for the elements formed, namely community institutions, but there are still limited resources owned by community institutions in assisting government tasks or as government partners. From this issue, the Community Service Team (PKM) of Universitas Islam Riau (UIR) in collaboration with Universiti Utara Malaysia (UUM) and the Government of Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia made a program of activities with the theme of strengthening community institutions in helping government tasks in Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia. The purpose of PKM activities (1) is to provide an understanding of the existence of community institutions as government partners in assisting the administration of government in Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia, (2) to provide an understanding of the existence of community institutions as a forum for community participation in planning, implementing development and improving services. The methods used are the Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Action Research (AR) methods. The results of PKM activities are (1) the formulation of a draft coordination forum to facilitate cooperation between the government and community institutions, (2) the availability of draft guidelines for the preparation of participatory development planning by the government of Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia, (3) the availability of draft technical guidelines for the implementation of community institution development by the government of Mukim Singkir Yan Kedah village, Malaysia.

Keywords: Community Institutions; Strengthening; Government Partner; Government Duties

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 15/02/2024

Diterima : 29/04/2024

Dipublikasikan : 22/07/2024

ABSTRAK

Kebutuhan dan dinamika masyarakat yang kompleks tentu menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah sehingga pemerintah membutuhkan mitra dalam membantu tugas pemerintahan adapun unsur yang dibentuk yaitu lembaga kemasyarakatan, namun masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintah atau sebagai mitra pemerintah. Dari isu tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau (UIR) bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Pemerintah Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia membuat program kegiatan dengan tema penguatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia. Tujuan kegiatan PKM (1) untuk memberikan pemahaman tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia, (2) untuk memberikan pemahaman tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan. Metode yang digunakan yaitu metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Action Research (AR)*. Hasil kegiatan PKM yaitu (1) adanya perumusan rancangan pembentukan forum koordinasi untuk memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, (2) tersedianya rancangan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia, (3) tersedianya rancangan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Kata Kunci: Lembaga Kemasyarakatan; Penguatan; Mitra Pemerintah; Tugas Pemerintahan

PENDAHULUAN

Pelayanan kepada seluruh masyarakat merupakan suatu tugas yang cukup berat bagi pemerintah, karena jumlah penduduk yang terus semakin banyak setiap tahunnya dan masyarakat juga semakin dinamis (Sharifi & Khavarian-Garmsir, 2020). Sedangkan di sisi lain, jumlah dari aparatur pemerintah yang terbatas, maka pemerintah perlu dibantu oleh lembaga kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Maulidiah et al., 2023). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah adalah institusi yang mempunyai kewenangan untuk memproses pelayanan publik dan mempunyai kewajiban untuk memproses pelayanan sipil bagi setiap warga

negara melalui lembaga pemerintahan (Rauf et al., 2023). Pemerintahan di definisikan juga sebuah sistem multi proses yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat (She et al., 2023).

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah (Castro-Arce & Vanclay, 2020). Keberadaan lembaga kemasyarakatan identik berada pada susunan pemerintahan terendah yaitu Desa/Kelurahan (Junaedi, 2023). Jika ditinjau dari sisi domain *governance* (pemerintah, swasta dan masyarakat) bahwa lembaga kemasyarakatan tergolong ke dalam kelompok

civil society (Haristya, 2020). Masyarakat sipil society yang dimaksud adalah identik diartikan dengan masyarakat madani (Bernhard, 2020).

Lembaga kemasyarakatan dibentuk pada hakikatnya sebagai mitra pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan akan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat (Miao et al., 2021). Bentuk pelayanan tersebut yaitu pada bidang pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan pemberdayaan masyarakat pada tatanan desa/kelurahan (Badaruddin et al., 2021). Penataan lembaga kemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Irawati et al., 2023). Peraturan tersebut salah satunya menjelaskan tentang jenis lembaga kemasyarakatan, tugas dan fungsi. Adapun jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Suharto, 2021).

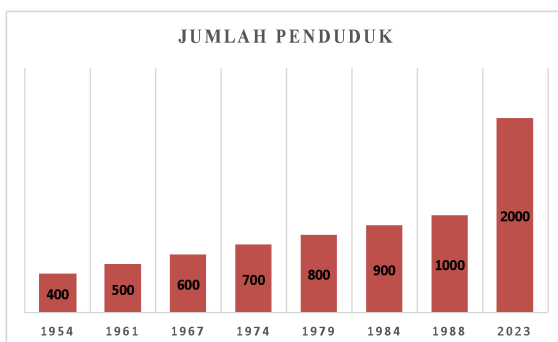
Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat (Kunyanti & Mujiono, 2021). Dalam melaksanakan tugas tersebut maka lembaga kemasyarakatan dibekali fungsi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian), meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan sumber daya manusia (Maulidiah et al., 2024).

Jika dicermati terkait hakikat, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan bahwa sudah jelas jika lembaga kemasyarakatan pekerjaannya terkait mengurus kepentingan masyarakat dan berada ditengah-tengah masyarakat yang memposisikan diri sebagai mitra pemerintah (Rauf, 2018). Posisi tersebut dapat diperkuat dengan penanganan kasus dan

konflik dalam lingkungan masyarakat yang harus di selesaikan atau di mediasi oleh lembaga kemasyarakatan (Sukaenah & Rusli, 2020). Kasus dan konflik yang terjadi dapat berupa konflik personal dengan personal maupun kelompok dengan kelompok (Yuslaini et al., 2023). Dapat dicontohkan seperti kasus rumah tangga, hubungan antar tetangga, batas wilayah, masalah persampahan, kenakalan remaja, dan kasus gangguan keamanan.

Dari kasus dan konflik yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan, tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi lembaga kemasyarakatan untuk menyelesaikannya dibutuhkan kemampuan dan profesionalitas dari unsur lembaga kemasyarakatan (Brodie, 2021). Namun, pada kenyataannya secara umum kedudukan lembaga kemasyarakatan masih lemah yaitu lembaga kemasyarakatan masih banyak yang belum memiliki bagan struktur organisasi (Möller et al., 2020). Selanjutnya belum memiliki peraturan-peraturan tentang lembaga kemasyarakatan, belum mempunyai program kerja, dan tidak memiliki sekretariat sehingga harus menumpang di kantor lurah, Masjid, Pos Ronda dan fasilitas umum lainnya oleh sebab itu perlu adanya upaya penguatan lembaga kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah (Rauf et al., 2019).

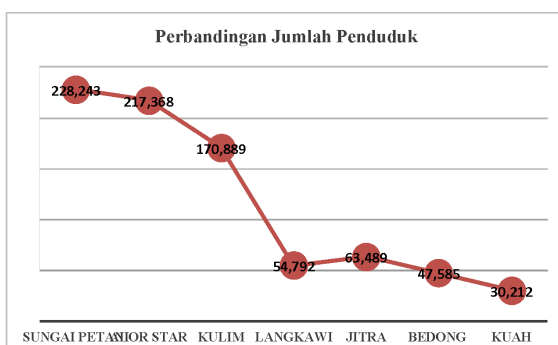
Berkaitan isu penguatan lembaga kemasyarakatan tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia, tetapi juga menjadi isu secara global pada negara lainnya seperti di negara Malaysia (Latief & Nashir, 2020). Negeri Kedah merupakan sebuah negara bagian di bawah pemerintahan Negara Malaysia yang jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1 di bawah ini.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Negeri Kedah, Malaysia Tahun 1954-2023

(Sumber: Statistik Kedah, Malaysia, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berkelanjutan dari setiap tahun di Negeri Kedah, laju peningkatan jumlah penduduk ditunjukkan dari tahun 1988-2023 terjadi peningkatan mencapai 1 juta jiwa. Selanjutnya jumlah penduduk Negeri Kedah pada tahun 2024 telah mencapai 2,037,559 jiwa. Negeri Kedah memiliki tujuh *District* yaitu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan District di Negeri Kedah, Malaysia Tahun 2024

(Sumber: Statistik Kedah, Malaysia, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa terdapat tujuh *district* di Negeri Kedah yaitu district Sungai Petani, Alor Star, Kulim, Jitra, Langkawi, Bedong, dan Kuah. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak yaitu pada *district* Sungai Petani berjumlah 228,343 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan

dalam membantu tugas pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia. Berdasarkan data dan analisis di atas terkait dengan lembaga kemasyarakatan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang bersifat holistik sebagai berikut.

1. Masih belum jelasnya jenis atau bentuk lembaga kemasyarakatan lainnya di Negeri Kedah, Malaysia.
2. Semakin bertambahnya jumlah penduduk kampung/desa yang harus dilayani dan semakin kompleksnya permasalahan yang ditangani oleh pemerintah Kampung Mukim Singkor Yan Kedah Kedah, Malaysia.
3. Masyarakat masih banyak yang belum memahami keberadaan lembaga kemasyarakatan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Selain identifikasi permasalahan yang bersifat holistik ada juga isu dan permasalahan yang bersifat prioritas terkait Lembaga kemasyarakatan di Mukim Singkir yan Negeri Kedah, yaitu sebagai berikut.

1. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah masih belum jelas, apakah bersifat koordinasi, konsultatif atau bersifat mitra di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.
2. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah Negeri Kedah, Malaysia.
3. Lembaga kemasyarakatan belum dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi masyarakat secara maksimal di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut.

1. Untuk memberikan pemahaman tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan

sebagai mitra pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

2. Untuk memberikan pemahaman tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Selain tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, selanjutnya diharapkan memberikan manfaat secara signifikan kepada masyarakat maupun pemerintah, adapun manfaat kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat bagi pemerintah yaitu membantu pemerintah dalam perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan.
2. Manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat menjadi memahami arti penting keberadaan Lembaga kemasyarakatan dalam membantu pemenuhan pelayanan kemasyarakatan.
3. Manfaat bagi akademik yaitu praktik dalam kegiatan pengabdian dapat diintegrasikan ke dalam materi bahan ajar.

Dari permasalahan, tujuan, dan manfaat kegiatan yang telah dijelaskan maka dianggap perlu untuk dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan bentuk penyuluhan penguatan Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

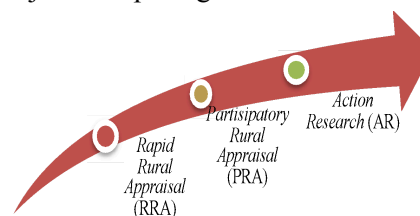
METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bentuk tindak lanjut hubungan kerjasama internasional antara Universitas Islam Riau (UIR) dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) sehingga terbentuklah inisiasi program kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat internasional yang

berlokasi di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada penyuluhan tentang penguatan Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia. Alasan menetapkan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat yaitu 1). Jumlah penduduk Negeri Kedah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tentunya ini akan berdampak pada beban kerja pemerintah sehingga dibutuhkan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan, 2). Sebagai tindak lanjut kerjasama internasional antara Universitas Islam Riau dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dimaksudkan adalah cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan kegiatan dimana teknik tersebut dianggap cocok dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi penerima manfaat kegiatan. Adapun metode yang digunakan dapat dijelaskan pada gambar berikut.



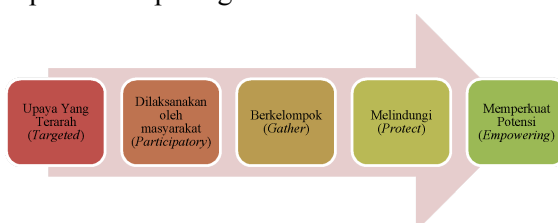
Gambar 3. Metode Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Negeri Kedah, Malaysia 2023

(Sumber: Olan Tim PKM, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa ada tiga metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu: 1). Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) yaitu dengan melakukan wawancara kepada kelompok peserta penyuluhan, melakukan observasi, pemetaan permasalahan dan memahami histori dan latar belakang penerima kegiatan (Chakraborty et al., 2020). 2). Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu dengan melakukan pemetaan wilayah dan

analisis keadaan, selanjutnya menentukan alternatif dan menentukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat kegiatan dikenal dengan teknik yang terbuka, cepat dan bersih (Eastwood et al., 2022), 3). Metode *Action Research* (AR) yaitu dengan melakukan penyadaran terhadap kebiasaan masyarakat yang membelenggu (Baklien et al., 2022).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat perlu ditetapkan pendekatan yang tepat dan rancang agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah di tetapkan. Adapun pendekatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Pendekatan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Negeri Kedah, Malaysia 2023

(Sumber: Olahan Tim PKM, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa ada lima pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia yaitu menggunakan pendekatan yaitu: 1). *Targeted* yaitu kegiatan yang dilakukan harus mempunyai tujuan dan capaian (Sadiq et al., 2023), 2). *Participatory* yaitu kegiatan yang dilakukan harus melibatkan kelompok masyarakat (Byams et al., 2023), 3). *Gather* yaitu kegiatan yang dilakukan terdiri dari berkelompok-kelompok entitas tertentu (Govindarajan et al., 2023), 4). *Protect* yaitu kegiatan yang dilakukan harus memberikan rasa nyaman dan aman tanpa adanya unsur paksaan ataupun ancaman (Kaleem, 2022), 5). *Empowering* yaitu kegiatan yang dilakukan harus membawa kemajuan atau pengembangan bagi penerima manfaat kegiatan (Cuomo & Dolci, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Metode Kegiatan

1. **Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA)**, Tim PKM melakukan telaah data sekunder terkait profil wilayah kegiatan termasuk peta wilayah Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia, melakukan kegiatan survei awal dengan melakukan diskusi dengan mitra kolaborasi yaitu dengan Dekan *School of Government college of Law, Government and International Studies* (COLGIS). Menyiapkan materi/pedoman wawancara/kuesioner yang akan disampaikan kepada peserta penyuluhan. Menyampaikan laporan hasil survei untuk pengajuan kegiatan kepada Universitas Islam Riau (UIR).

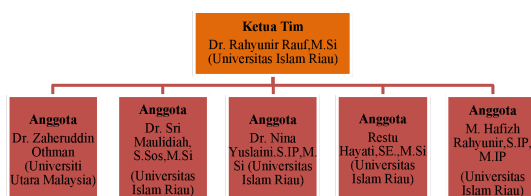
2. **Metode *Participatory Rapid Appraisal* (PRA)**, metode ini kelanjutan dari RRA yaitu tim PKM turun ke lokasi kegiatan dengan melibatkan beberapa stakeholder yaitu dalam hal ini ada dari pemerintah Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, tokoh masyarakat, masyarakat dan unsur akademisi. Melakukan diskusi, selanjutnya melakukan analisis masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan pemilihan alternatif pemecahan masalah.

3. **Metode *Action Research* (AR)**, tahapan terakhir dari metode ini yang dilakukan oleh tim PKM setelah mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang sifatnya sementara, yang belum diketahui ketepatannya maka perlu dilakukan pengembangan dengan melakukan penelitian untuk kegiatan selanjutnya.

b. Susunan Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dibentuk tim pengabdian masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari Dosen

Universitas Islam Riau (UIR) dan Dosen Universiti Utara Malaysia (UUM). Adapun susunan keorganisasian dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 5. Susunan Keorganisasian Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Negeri Kedah, Malaysia 2023

(Sumber: Olahan Tim PKM, 2023)

c. Mitra Kegiatan

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari mitra perguruan tinggi dan mitra dari unsur pemerintahan. Mitra dari unsur perguruan tinggi yaitu Universiti Utara Malaysia (UUM) yaitu sebagai mitra kolaborasi internasional dalam kegiatan PKM. Sedangkan mitra dari unsur pemerintahan yaitu Pemerintahan Kampung Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia yaitu sebagai mitra yang menerima manfaat kegiatan pengabdian masyarakat.

d. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tim yang terdiri dari beberapa Program Studi di Lingkungan UIR diantaranya Prodi Ilmu Pemerintahan. Tim dibentuk sesuai bidang keilmuan dan tema yang ditetapkan sesuai isu dan permasalahan mitra salah satunya tema penguatan lembaga kemasyarakatan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 23-24 Juni 2023 di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah. Kegiatan awal yang dilakukan adalah mengunjungi kampus mitra kolaborasi yaitu Universiti Utara Malaysia (UUM) Kedah, Malaysia.



Gambar 6. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat Internasional UIR di Kampus UUM Tahun 2023

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan pembukaan yang dilaksanakan bertempat di halaman Masjid Kampung Mukim Singkir Yan Kedah. Sebagai pembuka acara kegiatan kata sambutan di awali oleh Pejabat Pemerintah Mukim Singkir. Selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh Dekan *School of Government college of Law, Government and International Studies (COLGIS)*, Universiti Utara Malaysia (UUM) yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Halimah Abdul Manaf dan kata sambutan dari Rektor Universitas Islam Riau (UIR) Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi.,SH.,MCL.



Gambar 7. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Internasional UIR-UUM Tahun 2023

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023)

Adapun sasaran penerima manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu unsur lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan unsur masyarakat di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, dan mahasiswa dari Fakultas Colgis Universiti Utara Malaysia (UUM). Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan. Bentuk penyuluhan yang

dilakukan adalah berupa penyampaian materi dari setiap tim pengabdian masyarakat diantaranya materi penguatan kelembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Dalam penyampaian materi masing-masing tim membuat kelompok. Peserta penyuluhan terbagi atas dua kategori masyarakat dan mahasiswa. Untuk kelompok masyarakat dilakukan penyuluhan di halaman Masjid Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, sedangkan kelompok mahasiswa Colgis UUM penyuluhan dilaksanakan di dalam ruangan Masjid Kampung Mukim Singkir Yan Kedah.

Setelah selesai penyampaian materi oleh tim penyuluhan maka selanjutnya masuk pada tahapan diskusi dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta penyuluhan. Animo dan antusias peserta penyuluhan sangat tinggi mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada pemateri. Antusias dan animo ini dipengaruhi rasa ingin tahu peserta terhadap bentuk penataan lembaga kemasyarakatan dan penguatan lembaga kemasyarakatan di Indonesia sebagai mitra pemerintah.



Gambar 8. Foto Peserta PKM Dari Kalangan Masyarakat, Mahasiswa di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia Tahun 2023

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023)

Setelah kegiatan diskusi dan tanya jawab antara tim penyuluhan dan peserta penyuluhan selesai maka dilanjutkan dengan kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh tim penyuluhan dan peserta penyuluhan. Topik

konsultasi yang disampaikan bentuknya beragam sesuai dengan permasalahan yang dihadapi peserta penyuluhan seperti konsultasi terkait pembentukan sarana penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh lembaga kemasyarakatan, konsultasi terkait peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat oleh lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan, konsultasi terkait bagaimana membentuk hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan.

e. Target Kegiatan

Target yang ditetapkan dalam kegiatan penyuluhan pengabdian masyarakat ini yaitu bagaimana kegiatan yang dilakukan membawa dampak positif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan diharapkan terbentuknya hubungan kerja yang baik dan profesional antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah dalam membantu tugas pemerintahan.
2. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan diharapkan pemerintah kampung mampu memfungsikan lembaga kemasyarakatan dengan baik.
3. Setelah mengikuti pelatihan penyuluhan diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat memaksimalkan keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat secara maksimal.

f. Solusi Permasalahan

Dari permasalahan yang disampaikan oleh peserta penyuluhan dalam melalui tanya jawab dan konsultasi dengan tim penyuluhan, adapun solusi yang disarankan yaitu:

1. Merancang/membentuk forum koordinasi untuk memfasilitasi

kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga kemasyarakatan.

2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
4. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada lembaga kemasyarakatan.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.

g. Ketercapaian Target Kegiatan

Dari solusi permasalahan yang di diberikan oleh tim penyuluhan kepada mitra penyuluhan adapun *output* yang dihasilkan yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan usulan pembentukan forum koordinasi untuk memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga kemasyarakatan.
2. Tersedianya pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif oleh pemerintah Kampung.
3. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah Kampung Mukim Singkir, Kedah.
4. Terlaksananya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada lembaga kemasyarakatan.
5. Terbentuknya program dan kegiatan secara berkala dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan.

h. Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat adapun kendala yang dihadapi yaitu:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat sehingga bentuk kegiatan hanya

bisa dilakukan berupa kegiatan penyuluhan saja yang semestinya jika dilihat dari permasalahan yang dialami oleh peserta penyuluhan sebagai solusi sebaiknya dilakukan kegiatan pelatihan sehingga membutuhkan waktu cukup lama.

2. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengabdian masyarakat sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pelaksanaan kegiatan, namun secara umum biaya yang dialokasikan sudah dianggap sesuai.
3. Keterbatasan bahasa antara tim penyuluhan dengan peserta penyuluhan, sehingga bentuk komunikasi tidak berjalan secara maksimal namun secara garis besar komunikasi yang dilakukan sudah efektif.

i. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat telah terlaksana dengan baik namun setelah mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilaksanakan ada beberapa rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu membuat program kerjasama pada tahun berikutnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

j. Peta Lokasi Pelaksanaan

Berikut merupakan peta dari lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.



Gambar 9. Peta Lokasi Kegiatan PKM
(Sumber: Olahan Tim PKM, 2023)

SIMPULAN

Kegiatan kolaborasi pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan oleh Universitas Islam Riau (UIR) Dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan tema penguatan Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan di Mukim Yan District Kedah, Malaysia terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan. Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan. Adapun teknis pelaksanaan yaitu penyampaian materi oleh tim pengabdian masyarakat, diskusi berupa tanya jawab antara tim penyuluhan dengan peserta penyuluhan, dan melakukan konsultasi antara peserta penyuluhan dengan tim penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan mendapat respon baik dari peserta penyuluhan terlihat dari animo dan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan berupa diskusi yang dilakukan. Ada beberapa *output* yang dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu terbentuknya rancangan pembentukan forum koordinasi yang akan di bentuk oleh pemerintah Kampung dalam koordinasi antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, selanjutnya memperkuat membuat program pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih kepada Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia dan mahasiswa Colgis Universiti Utara Malaysia (UUM). Khususnya ucapan terimakasih kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Halimah Abdul Manaf selaku Dekan COLGIS Universiti Utara Malaysia (UUM) yang bersedia menjadi mitra kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan. Kemudian ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi. SH. MCL yang telah mendukung kegiatan ini dengan menyetujui pembiayaan kegiatan dan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan

pengabdian masyarakat. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Direktur DPPM(UIR) yang telah menyetujui pengajuan kegiatan pengabdian masyarakat. Terakhir ucapan terimakasih kepada anggota tim pengabdian masyarakat yang telah solid dan konsisten dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Baklien, B., Marthoenis, M., Aceh, A. R., & Thurston, M. (2022). Pasung: A qualitative study of shackling family members with mental illness in Indonesia. *Transcultural Psychiatry*, 60(3), 566–576. <https://doi.org/10.1177/13634615221135254>
- Bernhard, M. (2020). What do we know about civil society and regime change thirty years after 1989? *East European Politics*, 36(3), 341–362. <https://doi.org/10.1080/21599165.2020.1787160>
- Brodie, K. (2021). Teacher agency in professional learning communities. *Professional Development in Education*, 47(4), 560–573. <https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1689523>
- Byams, V. R., Baker, J. R., Bailey, C., Connell, N. T., Creary, M. S., Curtis, R. G., Dinno, A., Guelcher, C. J., Kim, M., Kulkarni, R., Lattimore, S., Norris, K. L., Ramirez, L., Skinner, M. W., Symington, S., Tobase, P., Vázquez, E., Warren, B. B., Wheat, E., & Buckner, T. W. (2023). Building the foundation for a community-generated national research blueprint for inherited bleeding disorders: research priorities in health services; diversity, equity, and inclusion; and implementation science. *Expert Review of*

- Hematology*, 16(sup1), 87–106.
<https://doi.org/10.1080/17474086.2023.2183836>
- Castro-Arce, K., & Vanclay, F. (2020). Transformative social innovation for sustainable rural development: An analytical framework to assist community-based initiatives. *Journal of Rural Studies*, 74, 45–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.11.010>
- Chakraborty, P., Daruwalla, N., Gupta, A. D., Machchhar, U., Kakad, B., Adelkar, S., & Osrin, D. (2020). Using Participatory Learning and Action in a Community-Based Intervention to Prevent Violence Against Women and Girls in Mumbai's Informal Settlements. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1609406920972234.
<https://doi.org/10.1177/1609406920972234>
- Cuomo, D., & Dolci, N. (2021). New tools, old abuse: Technology-Enabled Coercive Control (TECC). *Geoforum*, 126, 224–232.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.08.002>
- Eastwood, C. R., Turner, F. J., & Romera, A. J. (2022). Farmer-centered design: An affordances-based framework for identifying processes that facilitate farmers as co-designers in addressing complex agricultural challenges. *Agricultural Systems*, 195, 103314.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103314>
- Govindarajan, S., Mustafa, M. A., Kiyosov, S., Duong, N. D., Raju, M. N., & Gola, K. K. (2023). RETRACTED: An optimization based feature extraction and machine learning techniques for named entity identification. *Optik*, 272, 170348.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.170348>
- Haristya, S. (2020). The efficacy of civil society in global internet governance. *Internet Histories*, 4(3), 252–270.
<https://doi.org/10.1080/24701475.2020.1769892>
- Henry, N., Gavey, N., & Johnson, K. (2022). Image-Based Sexual Abuse as a Means of Coercive Control: Victim-Survivor Experiences. *Violence Against Women*, 29(6–7), 1206–1226.
<https://doi.org/10.1177/10778012221114918>
- Herrera Kelly, D. S. (n.d.). Local non-violent strategies amid Guatemala's postaccord violence: understanding the potential and limitations in poor urban neighborhoods. *Peacebuilding*, 1–18.
<https://doi.org/10.1080/21647259.2023.2251283>
- Irawati, R. I., Ginting, R. P., & Rahayu, N. S. (2023). STRATEGI PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA KENDALBULUR, KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(2), 53–71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.389>
- Junaedi, J. (2023). IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNANCE BASED ON PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE OF PUBLIC SERVICE IN INDONESIA. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 249–266.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160>
- Kaleem, A. (2022). The hegemony of Prevent: turning counter-terrorism policing into common sense. *Critical Studies on Terrorism*, 15(2), 267–289.
<https://doi.org/10.1080/17539153.2021.2013016>
- Kunyanti, S. A., & Mujiono, M. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(1), 12–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35335/ijosea.v10i1.2>
- Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local Dynamics and Global Engagements of

- the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290–309.
<https://doi.org/10.1177/1868103420910514>
- Maulidiah, S., Rauf, R., Manaf, H. A., & Khotami, K. (2023). Evaluation Of Simultaneous Village Head Elections In Kampar District, Riau Province In 2021. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 147–157.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i2.48887>
- Maulidiah, S., Rauf, R., Zainal, Z., & Rahyunir, M. H. (2024). Model of General Government Affairs in Mandau Sub-District, Bengkalis Regency, Riau: Dilemmatic in Planning Preparation. *International Journal of Science and Society*, 6, 210–223.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i1.1006>
- Miao, Q., Schwarz, S., & Schwarz, G. (2021). Responding to COVID-19: Community volunteerism and coproduction in China. *World Development*, 137, 105128.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105128>
- Möller, K., Nenonen, S., & Storbacka, K. (2020). Networks, ecosystems, fields, market systems? Making sense of the business environment. *Industrial Marketing Management*, 90, 380–399.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.07.013>
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Zanafa Publishing.
- Rauf, R., Munaf, Y., Zakaria, S. Z. S., Arifin, K., & Razman, M. R. (2019). Analysis of the Development on Deconcentration in Indonesia. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 14(19), 7179–7186.
<https://doi.org/10.36478/JEASCI.2019.7179.7186>
- Rauf, R., Prayuda, R., & Munaf, Y. (2023). Model of Government Development for MSMEs Through One Village One Product (OVOP) Concept by the Cooperatives and MSMEs Office in Rokan Hilir Regency. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(2), 635–640.
<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85152132017&origin=resultlist>
- Sadiq, M., Moslehpour, M., Qiu, R., Hieu, V. M., Duong, K. D., & Ngo, T. Q. (2023). Sharing economy benefits and sustainable development goals: Empirical evidence from the transportation industry of Vietnam. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(1), 100290.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100290>
- Sharifi, A., & Khavarian-Garmsir, A. R. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. *Science of The Total Environment*, 749, 142391.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142391>
- She, J., Blauw, A., Laakso, L., Mourre, B., Schulz-Stellenfleth, J., & Wehde, H. (2023). Fit-for-Purpose Information for Offshore Wind Farming Applications—Part-I: Identification of Needs and Solutions. In *Journal of Marine Science and Engineering* (Vol. 11, Issue 8).
<https://doi.org/10.3390/jmse11081630>
- Suharto, S. (2021). Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang. *QISTIE*, 14(1), 41–63.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4492>
- Sukaenah, S., & Rusli, R. (2020). The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes. *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*, 2(1), 63–80.

Yuslaini, N., Suwaryo, U., Deliarnoor, N. A.,
& Sri Kartini, D. (2023). Palm oil
industry and investment development in
Dumai City, Indonesia: A focus on local
economy development and sustainability.
Cogent Social Sciences, 9(1), 2235780.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2235780>